

POLITIK DINASTI DI KABUPATEN KEDIRI :

“Pertukaran Sosial Tim Pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri dengan Warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang”

Nilam Cahyaningtyas

Prodi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya
Cahyanilam95@gmail.com

Mohammad Arif Affandi

Prodi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya
Intermilaniacs@gmail.com

ABSTRAK

Politik dinasti menjadi pro dan kontra di kalangan elit politik terutama serta warga sipil. Mahkamah Konstitusi membuat sebuah keputusan yang berisi membolehkan adanya praktik politik dinasti termuat dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, MK membuat keputusan tersebut atas dasar pasal 28 mengenai HAM. Hasil penelitian terdahulu kebanyakan menilai dinasti politik itu negatif. Oleh sebab itu, penulis ingin melihat dari lain sisi. Fenomena politik dinasti juga terjadi di Kabupaten Kediri di mana Sutrisno yang menjabat menjadi bupati selama dua periode telah ‘mewariskan’ jabatan bupatinya kepada Haryanti, yakni istri pertamanya yang juga memegang jabatan selama dua periode. Penelitian dinasti politik menggunakan perspektif pertukaran sosial pemikiran Peter M. Blau sekaligus dijadikan pendekatan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan memakai metode dari Huberman. Peneliti menggali informasi mengenai pertukaran sosial antara warga Desa Pare Lor Kecamatan dengan tim pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang ada pertukaran sosial antara pemenang bupati dengan warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang. Warga memberikan suaranya terhadap petahana bahkan mendapat peringkat pertama selama dua periode, pemilu pada tahun 2010 dan 2015 hal ini menjadi indikator pertama bahwa Desa Pare Lor mendukung adanya politik dinasti. Peneliti dapat membuktikan bahwa politik dinasti tidak selalu dimaknai negatif dengan bukti bahwa dari hasil penelitian ini warga Desa Pare Lor cukup mengapresiasi kinerja Bupati Haryanti-Masykuri yang memberikan banyak progress pada infrastruktur di sana. Program yang diberikan juga cukup memberi kemajuan di Desa Pare Lor, seperti penghijauan, kantar di SK-kan, program GNOTA dll. Membuktikan bahwa politik dinasti dimaknai positif oleh warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang.

Kata Kunci : politik dinasti, warga dan tim pemenangan, pertukaran sosial.

ABSTRACT

The political dynasty became the pro and contra of the political elite as well as civilians. Constitution Court decided if political dynasty allowed to exist, in decision MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, based on section 28 about human right. But, in some research that political dynasty negativity is visible. Writer wants to see another perspective, not always political dynasty negativity is visible. Phenomena of political dynasty also occur in Kediri Regency, which is Sutrisno ‘give’ the position as regent to hold on two periods to his wife Haryanti also two periods. This research uses social exchange perspective and approach by Peter M. Blau. Use qualitative by Huberman to analyze this research. Researcher wants to search some information about social exchange between Pare Lor citizen and the campaign team Haryanti-Masykuri. The result shows that social exchange between citizen and the campaign team exists. Citizen gives them voice to Haryanti-Masykuri on political election two periods 2010 and 2015, that is the first indicator if citizen supports political dynasty existence. Researcher can prove that political dynasty is not always negativity visible with citizen appreciation of Haryanti-Masykuri, who gives much progress on infrastructure development and gives some programs to Pare Lor village such as reboitation, SK for karangtaruna, GNOTA etc. Shows the political dynasty positivity visible by citizen in Pare Lor village Kunjang districts.

Keyword : political dynasty, citizen and the campaign team, social exchange.

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang mengenai otonomi daerah yakni yang telah diatur pada UU No. 23 tahun 2014 (BPN Undang-Undang : 2014). Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemilu pada sepenuhnya merupakan hak otonomi pemerintah daerah. Berbicara mengenai pemilu baru diadakan pada tahun 2004, pada tahun itu pula pemilu diadakan

pertama kali di Kabupaten Kediri serta kursi kepemimpinan dipegang oleh orang yang sama. Pada pemilihan kepala daerah sebelumnya terpilih lah seorang bupati yang berasal dari partai PDI P, Ir. Sutrisno, kemudian ia terpilih lagi pada pemilihan secara langsung di tahun 2004. Masa kepemimpinan selama dua periode sudah habis, sehingga diperlukan adanya pergantian pemimpin daerah baru. Akan tetapi, menariknya setelah

masa jabat Sutrisno habis pada pemilukada berikutnya ia memajukan dua istrinya sekaligus.

Pemilukada serentak yang diadakan pada tahun 2010 tersebut dimenangkan oleh istri dr. Haryanti. Bahkan, tidak berhenti di situ pada pemilukada serentak tahun 2015 Haryanti kembali terpilih menjadi bupati. Maka, dengan ini khalayak menyebut bahwa Sutrisno membuat dinasti di Kabupaten Kediri. Haryanti menampik adanya kabar tersebut, sebab ia merasa bahwa terpilihnya menjadi bupati lagi karena dipilih bukan ditunjuk. Sesuai dengan gagasan yang dicetuskan oleh Weber mengenai kekuasaan, otoritas dan paksaan dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Damsar, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, paksaan adalah kemampuan menguasai orang lain namun secara tidak sah sebab tidak memiliki hak atas penguasaan tersebut, sedangkan otoriter sama dengan kewenangan atas dasar hak yang dimiliki atau suatu dasar kepercayaan untuk memengaruhi orang lain (Damsar, 2010 : 66). Maka jelas bahwa selama hampir dua puluh tahun lamanya Kabupaten Kediri dipegang oleh dinasti Sutrisno bukan karena unsur paksaan, melainkan karena Haryanti telah dipilih oleh rakyat.

Fenomena serupa sudah banyak terjadi di lain daerah, seperti Ratu Atut Chosiyah yang menguasai Banten beberapa keluarganya juga menjabat sebagai ketua di sebuah instansi. Ada pula dinasti model lintas daerah, yakni dalam satu keluarga memegang jabatan penting di berbagai daerah, sedangkan yang terjadi di Kediri ini merupakan dinasti tipe regenerasi (Nabila : 2017).

Kalangan elit politik, tentunya menilai dinasti politik suatu hal yang negatif sebab tidak memberi kesempatan pada yang lain, hal ini ditunjukkan dengan adanya UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pada Pasal 7 huruf r menyebutkan bahwa calon pemimpin daerah ataupun wakilnya dilarang memiliki hubungan kepentingan dengan petahana. Dimaksudkan tidak memiliki ikatan darah, perkawinan atau garis keturunan, akan tetapi, pasal tersebut kemudian digugat dengan alasan bahwa pembatasan tersebut telah menyalahi aturan mengenai HAM. Pasal 28, selain itu pada putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa petahana atau yang seseorang yang masih memiliki hubungan dekat dengan petahana boleh mengajukan diri sebagai calon pemimpin (Poskediri : 2017).

Penjabaran mengenai dinasti politik di atas penulis ingin melihat sisi positifnya, karena tidak selamanya dinasti politik dimaknai negatif, hal ini untuk menguatkan alasan Mahkamah Konstitusi membolehkan dinasti politik di Indonesia. Maka pada tema yang diangkat dalam penelitian ini akan menilik dari sisi pertukaran sosialnya. Bagaimana pertukaran sosial antara

petahana atau tim suksesnya dengan masyarakat yang selama dua periode tetap konsisten menjadi penyumbang suaranya melebihi angka 80% (berikut akan dijelaskan data yang pemilukada yang diperoleh dari komisi pemilihan umum), berdasarkan data yang didapat dari KPUD Kediri menunjukkan bahwa petahana, Hj. Dr. Haryanti pada pemilukada tahun 2010 memperoleh suara unggul dibanding dua pasangan calon yang lain. Petahana memperoleh suara sejumlah 391.079 atau dengan prosentase 54,58% yang berhasil dikantongi dari jumlah keseluruhan suara yang sah (KPUD Kediri : 2010). Pada tahun 2010 rating tertinggi suara yang lari pada petahana adalah Kecamatan Kunjang, prosentase sebesar 66,21%. Tepatnya di Desa Pare Lor yang menjadi desa tertinggi suaranya yang disumbangkan, dengan jumlah prosentase 81,57% (sisa suara 2% golput dan lainnya ke kandidat lain), sedangkan di tahun 2015 prosentase suara pemilih di Desa Pare Lor sebesar 85,11% (sisa suara ke kandidat lain. Jadi, dapat disimpulkan Desa Pare Lor memiliki konsistensi suara pada pemilukada tersebut. Terdapat peningkatan yang cukup banyak dibanding tahun sebelumnya. Apakah memang hal ini merupakan efek dari salah satu cara petahana untuk memperoleh legitimasinya serta melanggengkannya dengan cara materiil, yakni dengan memberikan janji memenuhi kebutuhan dasar serta fasilitas umum untuk masyarakat (Ramlan Surbakti, 2010 : 123). Mengingat sosok Haryanti adalah istri dari mantan bupati yang juga menduduki kursi bupati selama dua periode maka sesuai dalam buku yang berjudul "Patronage Driven Democracy : Emerging Local Politics in the post-Soeharto Indonesia", bahwa petahana dapat berperan menjadi seorang patron yang bertindak seakan memberi keuntungan kepada klien (Wawan, 2017 : 3).

Hal yang mencolok dan kemudian menarik diteliti Kecamatan Kunjang merupakan daerah asal dari lawan petahana di periode pemilukada tahun 2010. Lebih tepatnya calon wakil bupati, alm. Sulaiman Lubis, yang dulunya menjadi wakil bupati semasa Sutrisno menjabat sebagai bupati di periode keduanya, sesuai dengan berita online yang dilansir dari sebuah media online (Adakita News : 2015). Pada pemilukada yang dilakukan di tahun 2010 malah Kecamatan Kunjang yang menduduki peringkat pertama suara pemilihnya ke Haryanti. Bahkan di periode selanjutnya juga masih menunjukkan konsisten suaranya. Hal ini sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut, terkait dengan apa yang sudah didapat dari pertukaran sosial yang sudah dilakukan oleh warga Desa Pare Lor. Mereka sudah memberikan suaranya kepada petahana, dan tentunya hal ini menguntungkan bagi petahana sebab ia mendapat sumbangan suara yang banyak sehingga dapat menduduki kursi jabatan bupati selama dua periode. Pada

tahun 2009 atau pada masa sebelum kampanye di kebanyakan daerah seperti Kecamatan Puncu, Kecamatan Plosoklaten termasuk juga Kecamatan Kunjang beberapa jalan telah dimakadam, dan jalan baru diaspal beberapa tahun kemudian setelah Haryanti menjabat menjadi bupati. Akan tetapi, berbeda dengan Kecamatan Kunjang khususnya Desa Pare Lor yang pada tahun 2010 perbaikan jalan sudah dilakukan (data dari hasil wawancara dengan salah seorang warga yang pada tahun 2010 menjadi KPPS). Kemudian penulis ingin mengetahui dari pertukaran sosial tersebut imbalan apa yang sudah didapat oleh warga Desa Pare Lor, baik yang bersifat materil maupun imateril dalam tiga fase yaitu pada saat sebelum pencalonan bupati, pada saat kampanye dan setelah Haryanti-Masykuri menjabat menjadi bupati.

Berdasarkan latarbelakang masalah yang ada maka rumusan yang dibuat adalah bagaimana pertukaran sosial yang terjadi antara tim pemenang dengan warga. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui apa saja yang dipertukarkan oleh kedua belah pihak dalam tiga fase, yakni sebelum pencalonan, pada masa kampanye dan setelah Haryanti-Masykuri menjadi bupati. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara praktik maupun teoritik. Manfaat praktik yang diharapkan adalah dapat memahami mengenai politik dinasti dari perspektif pertukaran sosial Peter M. Blau, memberi warna pada kajian politik dinasti yang telah dianalisa dari berbagai perspektif teori. Serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, sedangkan manfaat teoritik yang diharapkan adalah Menjadi sebuah harapan besar bagi penulis agar hasil dari penelitian yang akan dilakukan dapat menjadi bahan masukan atau sebagai penguatan teori di dalam disiplin Ilmu Sosiologi, khususnya sosiologi politik. Juga, menjadi pengetahuan baru untuk menguatkan alasan Mahkamah Konstitusi membolehkan adanya praktik politik dinasti di Indonesia mengingat pada penelitian ini melihat sisi positif dari praktik tersebut.

Fenomena ini kemudian akan dianalisis menggunakan teori pertukaran sosial pemikiran Peter M. Blau. Teori tersebut menjelaskan pertukaran sosial yang dilakukan oleh kelompok dengan kelompok dan tidak seimbang, di mana yang lebih banyak memberi akan mendapat kuasa (bukan secara otoritas). Pertukaran di sini yang dimaksud tidak saja berupa materi namun juga yang bersifat imateri, oleh sebab itu Blau menyebutnya dengan reward intrinsik dan ekstrinsik. (Paul Johnson, 1986 : 77)

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai “DINASTI

POLITIK DI KEDIRI : Pertukaran sosial tim pemenang bupati Haryanti-Masykuri dengan warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang”. Pendekatan yang digunakan ialah pertukaran sosial dari perspektif Peter M. Blau sesuai dengan fenomena yang akan diteliti oleh penulis mengenai pertukaran sosial antara tim pemenang bupati dengan warga desa. Blau menjelaskan pertukaran sosialnya dan menawarkan beberapa proposisi yaitu penghargaan intrinsik dan ekstrinsik, pertukaran tidak seimbang sehingga tercipta sebuah kekuasaan (bukan kekuasaan secara formal), cara mendapatkan kekuasaan, cara melepaskan dari ketergantungan, serta dari pertukaran tidak seimbang ke struktur makro.

Informan dari penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik snowball, sebab peneliti belum ada jaringan di lokasi penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang, sedang waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei hingga Agustus. Data dikumpulkan melalui sumber primer dan sekunder, masing-masing data tersebut didapat saat wawancara baik saat masih observasi ataupun ketika sudah dilakukan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan ialah kualitatif dan menggunakan perspektif Blau, analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis dari Miles dan Huberman. Huberman. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Pada tahap reduksi, data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak, kompleks dan rumit, maka perlu dilakukan pemilahan data yang sesuai dengan fokus penelitian, menyaring informasi yang pokok dan dicari tema pun polanya. Tahap penyajian data, setelah data direduksi kemudian data disajikan dalam bentuk naratif, karena kebanyakan data kualitatif disajikan dalam teks bersifat naratif. Kemudian pada tahap terakhir, verifikasi dan penarikan kesimpulan, kesimpulan pada data kualitatif sifatnya tidak pasti. Jika di awal kesimpulan masih bersifat sementara maka akan berubah bila ditemukan bukti-bukti baru, namun jika kesimpulan awal sudah disertai dengan bukti yang kuat dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. (Sugiyono, 2010 : 247-252)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertukaran Sosial Tim Pemenangan dengan Warga

Sesuai beberapa tujuan dari penelitian ini maka akan dijelaskan satu persatu bagaimana pertukaran sosial yang dilakukan tim pemenang petahana dengan warga Desa Pare Lor pada tiga fase : saat sebelum pencalonan, pada saat kampanye dan setelah Haryanti-Masykuri terpilih menjadi bupati.

Pada saat sebelum pencalonan : berdasarkan hasil temuan di lapangan, salah seorang subjek mengatakan bahwa pernah mendapat bantuan dana pendidikan yang disebut GNOTA, saat itu yang mendapat bantuan dana adalah orang-orang yang tergabung sebagai kader posyandu. Serta memang ditujukan khusus bagi siswa yang sedang naik jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA dan SMA ke Perguruan Tinggi kebetulan salah seorang subjek memiliki anak yang tengah naik jenjang dari SMP ke SMA. Pemberian bantuan tersebut dilakukan di pendopo kabupaten kemudian pemberian dana tersebut berupa uang tunai sebesar empat ratus ribu diberikan langsung oleh Haryanti kepada kader posyandu, termasuk subjek. Pemberian beasiswa GNOTA tersebut tepatnya pada tahun 2009 dan pada saat itu Haryanti belum menjadi bupati. Tahun 2009 jabatan bupati masih dipegang oleh Sutrisno.

Situasi seperti di atas jika dilihat dari sudut pandang politik maka dapat dikatakan bahwa Haryanti secara tidak langsung melakukan perkenalan kepada warga Kabupaten Kediri. Sudah terbukti karena pada tahun 2010 Haryanti ikut dalam kancah politik perebutan kursi bupati. Blau mengatakan bahwa dalam proses pertukaran sosial maka terdapat dua bentuk *reward* yang dapat dipertukarkan, yaitu *reward* intrinsik dan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik lebih pada afeksi, pujian sosial dan suatu *reward* yang memang berasal dari hubungan itu sendiri. Lain halnya dengan penghargaan ekstrinsik yang memang dapat dilihat dari luar yakni berupa materi. Dalam kasus di atas jika penghargaan yang diberikan petahana semasa masih belum mencalonkan diri berupa uang maka dapat dikatakan bahwa yang diberikan adalah penghargaan ekstrinsik.

Pada saat kampanye : Haryanti-Masykuri terpilih menjadi Bupati Kediri sebanyak dua kali, di periode 2010-2015 kemudian berlanjut di periode 2015-2020. Pada saat kampanye tahun 2010 pasangan calon tersebut memberikan *reward* berupa kaos sebagai atribut untuk kampanye yang diadakan di Stadion Canda Bhirawa Kecamatan Pare.

Pada tahun 2010 setelah Haryanti-Masykuri sudah terpilih menjadi bupati diadakan kegiatan salat malam yang dilaksanakan di Desa Kapi Kecamatan Kunjang oleh Sutrisno, dua truk rombongan dari Desa Pare Lor turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut diadakan adalah salah satu alasan agar terjalannya anjagsana antara mantan bupati dengan warga dan mengajak kebaikan, disertai pula dengan pemberian penghargaan secara materil yaitu berupa mukena untuk jamaah perempuan. Saat itu memang hanya Sutrisno yang hadir tanpa disertai istrinya, Haryanti. Jika diamati kegiatan rutin yang memang

sudah diagendakan di beberapa daerah dan dengan sistem bergilir oleh mantan bupati memang terkesan membuat sebuah pencitraan. Mengapa demikian, karena istri pertamanya yang sudah menjadi bupati di tahun 2010-2015 akan digadang mencalonkan lagi di periode selanjutnya. Terbukti di tahun 2015 Haryanti kembali terpilih menjadi Bupati Kediri. Proses kampanye yang dilakukan jauh sebelum pemilihan kepala daerah di periode selanjutnya, hal ini dengan tujuan membangun sebuah kesan baik di hadapan warga.

Pada masa jabat Haryanti-Masykuri di periode 2010-2015 memang benar-benar merealisasikan janjinya kepada warga Desa Pare Lor, yakni memberikan kucuran dana ADD untuk biaya pembangunan jalan. Oleh karena itu, warga terkesan dengan kinerja Bupati Haryanti-Masykuri selain dinilai menepati janji juga memberikan banyak program bermanfaat untuk warga Desa Pare Lor. Mulai dari zakat tahunan untuk warga kurang mampu (khususnya janda), program penghijauan dan beasiswa untuk biaya sekolah (GNOTA). Semua hal tersebut tidak lain adalah sebagai *reward* yang diberikan pihak Haryanti-Masykuri untuk mengkampanyekan dirinya yang akan kembali mencalonkan di periode 2015-2020.

Pada saat sudah terpilih menjadi bupati : setelah *cost* yang dikeluarkan oleh warga Pare Lor berupa suara, sehingga Haryanti-Masykuri terpilih sebagai bupati di Kediri bahkan dua periode mereka memegang jabatan. Suara yang diberikan oleh warga Desa Pare Lor memang tidak sedikit, berdasarkan hasil rekap data dari KPUD Kediri Desa Pare Lor menjadi pemberi suara tertinggi pada pemilukada tahun 2010. Atas kesepakatan yang telah disampaikan pihak tim pemenang bahwa desa mana saja yang memberikan suara terbanyak maka akan mendapat imbalan berupa pembangunan jalan.

Pembangunan jalan di Desa Pare Lor cukup signifikan, dari yang dulunya memang masih berupa makadam sekarang sudah dibangun jalan aspal dan beton hingga ke pelosok menuju area persawahan. Setiap tahun Pare Lor juga menerima bantuan pembangunan masjid, program penghijauan dari pemda juga kerap dilaksanakan di Pare Lor. Setiap bulan Ramadhan program zakat dari Bupati juga selalu diadakan untuk warga Desa Pare Lor, berupa uang tunai sebesar limapuluh ribu rupiah terkadang juga berupa sembako.

Kegiatan pengajian yang dikhususkan untuk muslimat NU juga sempat diadakan oleh Haryanti-Masykuri pasca mereka dilantik menjadi bupati Kediri pada tahun 2010. Pada acara pengajian tersebut ada sesi pembagian seragam yang diserahkan langsung oleh bupati kepada jamaah pengajian. Mengingat wakil bupati sendiri merupakan salah seorang muslimat NU.

Maka jika dilihat dari perspektif teori Peter M. Blau penghargaan yang diberikan Bupati Haryanti-

Masykuri berupa materil sehingga masuk dalam kategori penghargaan ekstrinsik. Adapun penghargaan lainnya yang diberikan oleh Haryanti kepada warga Desa Pare Lor, yaitu menyempatkan hadir untuk memenuhi undangan dalam rangka peresmian jembatan yang ada di Dusun Jember Desa Pare Lor meskipun hanya sebentar sekadar memberi sambutan. Penghargaan tersebut tergolong dalam penghargaan intrinsik, karena tidak berupa materi melainkan lebih pada sesuatu yang tidak terlihat. Blau menjelaskan bahwa *reward* yang intrinsik muncul ketika hubungan yang dijalin sudah intim dan pertukaran *reward* sudah banyak macamnya. Penjelasan adalah jika hubungan yang dijalin sudah intim maka pertukaran sosial yang dilakukan akan berbeda dengan yang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Haryanti, hal ini terlepas untuk memenuhi undangan peresmian jembatan juga karena masih menyambung silaturahmi dengan warga Pare Lor.

Penjelasan di atas adalah imbalan yang sudah diberikan pihak Haryanti-Masykuri terhadap warga Desa Pare Lor, Kecamatan Kunjang. Selanjutnya akan dijelaskan apa saja *cost* yang sudah diberikan warga kepada petahana. Memberikan sejumlah suara yang cukup banyak kepada pasangan Haryanti-Masykuri memang sudah dibahas di bab awal penelitian ini, bahkan Desa Pare Lor menjadi peringkat tertinggi se-Kecamatan Kunjang termasuk se-kabupaten. Suara dalam pemilihan kepala daerah merupakan pemberian dalam bentuk yang bisa di lihat dari luar, bisa dikatakan *cost* yang dikeluarkan oleh warga Pare Lor tergolong berupa materil. Jadi, alasan warga Desa Pare Lor mengeluarkan *cost* tersebut dengan tujuan agar mendapat imbalan dana untuk pembangunan jalan dari tim pemenang Haryanti-Masykuri.

Warga Desa Pare Lor juga memberikan pujian sosial kepada Haryanti-Masykuri atas kinerjanya, di mana Blau menyebutnya dengan penghargaan intrinsik atau imbalan yang bersifat imateril. Beberapa informan yang sudah diwawancarai terkait penelitian ini mengatakan bahwa sangat terkesan dengan kinerja bupati Haryanti, pembangunan jalan di Desa Pare Lor sangat pesat. Banyak program diberikan dan cukup membangun, seperti penghijauan, program GNOTA, revitalisasi posyandu juga kegiatan salat malam yang sampai saat ini masih dijalankan oleh eks bupati atau suami dari Haryanti. Kegiatan salat malam ini yang paling mengena bagi masyarakat karena Sutrisno (eks bupati) mengajak kepada kebaikan, tidak hanya dunia saja yang dipikirkan melainkan juga kehidupan setelahnya. Warga juga menilai bahwa Haryanti merupakan sosok yang ramah dan juga orang yang tidak gila hormat, terbukti dengan ia masih menyempatkan hadir dalam beberapa acara yang diadakan warga. Pernah juga berbicara satu meja dengan

pengurus karangtaruna kabupaten, kemudian beberapa ide yang diusulkan Haryanti kepada karangtaruna kabupaten cukup bisa diterima salah satunya adalah ide diturunkan SK untuk karangtaruna di setiap desa, sebab jika karangtaruna tidak di SK-kan maka BUMDes yang merupakan salah satu alokasi dana dari Dana Desa tidak ada yang mengelola. Dari situ salah seorang informan menilai sosok Haryanti memang orang yang sabar dan tidak gila hormat. Hal ini menandakan bahwa Haryanti maupun Sutrisno begitu mendapat apresiasi dari warga bukan hanya karena banyaknya materi yang telah diberikan akan tetapi karena faktor sosoknya yang baik.

Dapat disimpulkan bahwa kesan baik atau pujian yang diberikan warga Desa Pare Lor kepada Haryanti adalah merupakan *reward* intrinsik, Blau mengatakan bahwa dalam hubungan sosial yang secara intrinsik mendatangkan penghargaan yang ditunjukkan dalam suatu persahabatan karib dan pertukaran ekonomi di pasaran yang bersifat impersonal, menggambarkan penghargaan intrinsik dan ekstrinsik yang cukup ekstrim. Perlu diingat lagi, harus dilihat pembedaannya dari sisi bagaimana hubungan pertemanan tersebut menggabungkan antara yang intrinsik dan ekstrinsik. Seperti contoh, ketika si A dan si B berteman mereka sudah bekerja sama dan mengembangkan suatu persahabatan karib selain itu mungkin hubungan mereka juga untuk meningkatkan karir. Atau bahkan seseorang yang berteman akrab dengan orang yang memiliki status lebih tinggi hal ini tidak menutup kemungkinan dapat menguntungkan bagi yang lain secara ekstrinsik. Pernyataan Blau di atas jika dikaitkan dengan fakta di lapangan yang ada mengenai pertukaran antara tim pemenang Haryanti-Masykuri dengan warga Desa Pare Lor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua pihak memiliki kepentingan ekstrinsik dalam pertukaran tersebut. Di pihak warga, dengan semua *cost* yang sudah dikeluarkan kepada Haryanti memiliki tujuan yaitu agar mendapat imbalan berupa pembangunan jalan. Sama halnya dengan pihak Haryanti yang sudah memberikan janji kepada warga juga pencitraan yang sejauh ini sudah dilakukan oleh suaminya terutama pada kegiatan salat malam, di balik itu juga terdapat kepentingan yang dapat menguntungkan secara ekstrinsik yaitu sebuah kedudukan dan kekuasaan.

Pertukaran tidak Seimbang Tim Pemenangan dengan Warga

Penghargaan intrinsik dan ekstrinsik sudah dibahas di atas, kemudian berlanjut pada proposisi yang kedua atas teori pertukaran pemikiran Blau. Pada hubungan pertukaran yang terjalin, bilamana salah seorang lebih banyak menerima ketimbang memberi maka lama-kelamaan akan menaruh rasa sungkan dan segan terhadap

yang lain. Ia lebih banyak menerima dan tidak memiliki sesuatu yang dapat dipertukarkan maka salah satu usaha yang dilakukan adalah meyakinkan pihak pemberi untuk memberikan sesuatu yang diharapkan. Di sisi lain juga harus menerima posisinya sebagai subordinasi, meskipun sebenarnya belum tentu ia dapat dikatakan lemah dalam segala hal. Hal ini yang kemudian memunculkan perbedaan status antara yang menerima banyak dengan yang memberi banyak.

Fakta yang terjadi di lapangan, warga Desa Pare Lor sudah menerima banyak dari tim pemenang bupati Haryanti-Masykuri yang telah disebutkan di sub bab sebelumnya. Pada tahun 2010 Sutrisno mengadakan kegiatan salat malam yang dilaksanakan di Desa Kapi, Kecamatan Kunjang bertepatan saat Haryanti sudah menjabat menjadi bupati Kediri kala itu. Di situ dari pihak Sutrisno meminta kepada pihak Kecamatan Kunjang untuk mendatangkan sebanyak 4500 jamaah, kemudian dari pihak kecamatan memberi perintah kepada setiap kepala desa agar bisa mengajak warganya sebanyak mungkin mengikuti kegiatan salat malam. Sebab jika jamaah salat malam pada saat itu tidak mencapai angka yang ditentukan maka akan ada pengulangan kegiatan, akhirnya pada saat itu kepala desa Pare Lor mengusahakan sebisa mungkin mendatangkan dua truk jamaah yang kemudian mengenai transportasi ditanggung secara pribadi. Pada waktu itu kebetulan jamaah yang hadir 7000 peserta.

Di atas dapat dijelaskan bahwa warga Pare Lor dengan sebisa mungkin dapat mengikuti kegiatan salat malam yang diadakan oleh eks bupati Kediri tersebut, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya rasa segan karena merasa sudah banyak dibantu pasca terpilihnya Haryanti sebagai bupati Kediri. Bukan karena rasa takut dengan adanya kabar jika jamaah yang hadir tidak memenuhi kuota maka akan diadakan pengulangan, akan tetapi lebih pada rasa sungkan dan segan. Warga Desa Pare Lor juga merasa memiliki hutang budi terhadap bupati Haryanti-Masykuri karena sudah banyak dibantu baik berupa dana maupun program-program. Namun, hal ini akan menjadi berbeda jika dibandingkan dari sisi antara warga dengan kepala desa Pare Lor. Warga menganggap bahwa dalam acara kegiatan salat malam benar-benar murni untuk mengajak pada kebaikan, tidak peduli apakah ditanggung dengan kepentingan politik atau tidak. Pandangan ini jelas berbeda dengan kepala desa Pare Lor, sebab ia yang mengetahui pasti bagaimana yang sebenarnya. Kepala desa Pare Lor bisa dikatakan berada di posisi yang tidak terlihat oleh warganya dalam proses pertukaran ini, di antara pertukaran yang tidak seimbang ini kepala desa mengeluarkan *cost* secara pribadi yang tidak banyak diketahui warga. Berikut beberapa *cost*

yang dikeluarkan kepala desa Pare Lor demi untuk Desa Pare Lor mendapatkan *reward* :

Dana pribadi pada saat pemilukada tahun 2010, memberikan uang kepada warga yang hadir di TPS sebesar sepuluhribu rupiah. Sebelumnya memang ada kesepakatan bahwa warga dimohon kerja samanya agar mau memilih pasangan Haryanti-Masykuri, demi untuk mendapat imbalan berupa pembangunan jalan.

Pada saat masa kampanye tahun 2010 mengeluarkan dana secara pribadi untuk membeli kaos cabup, demi untuk mengirimkan peserta kampanye yang diselenggarakan di Kecamatan Pare.

Transportasi pribadi yang digunakan untuk memberangkatkan dua truk rombongan jamaah salat malam yang dilaksanakan pada tahun 2010 tepatnya di Desa Kapi, Kecamatan Kunjang. Hal ini dilakukan agar jamaah yang hadir memenuhi kuota permintaan eks bupati dan tidak terjadi pengulangan atau remidi kegiatan tersebut.

Kepala Desa Pare Lor memang mengeluarkan banyak materi demi untuk berjalannya barter antara tim pemenang dengan warga, akan tetapi sama sekali tidak ada pertukaran sosial secara pribadi antara kepala desa dengan tim pemenang. Kepala Desa Pare Lor murni ingin membangun desanya menjadi lebih baik khususnya pada infrastruktur yang tentunya membutuhkan dana tidak sedikit, hanya dengan cara barter ini Desa Pare Lor bisa memperbaiki jalannya.

Penghargaan yang diberikan pihak Haryanti-Masykuri tidak saja meliputi pembangunan saja melainkan beberapa program yang cukup memberi kemajuan desa dan keorganisasian pemuda. Maka, tetap dikatakan bahwa pertukaran yang terjadi adalah tidak seimbang selain itu Desa Pare Lor juga diistimewakan oleh Bupati Haryanti-Masykuri sebab dalam hal pembangunan jalan sudah lebih maju dibanding desa lain. Bupati Haryanti-Masykuri juga hanya memberikan program zakat bupati setiap tahun hanya di Desa Pare Lor saja, sedangkan menurut survei di beberapa desa lain tidak ada.

Strategi Tim Pemenangan Mendapat Dukungan Warga

Sejauh penelitian yang sudah dilakukan, maka hasil dari penelitian tersebut memang pihak dari Haryanti kala itu memberikan banyak *reward* kepada warga Pare Lor, baik yang berupa *reward* ekstrinsik pun intrinsik. Hal ini dilakukan sebab adanya kepentingan bahwa Haryanti akan maju lagi dalam perebutan kursi bupati di periode 2015-2020, pada waktu itu saat kampanye menuju pemilukada tahun 2015 adanya kesepakatan yang sama seperti sebelumnya yaitu akan adanya bantuan dana untuk pembangunan lagi. Warga Pare Lor yang kemudian

memberikan suaranya lagi dalam jumlah yang tidak sedikit, mencapai angka 85%. Terbukti sekarang Haryanti sudah menjabat menjadi bupati di periode keduanya.

Blau menyatakan bagi seseorang yang memiliki nilai lebih maka akan dapat memberikan pelayanan atau pertolongan kepada yang membutuhkan, dan hal ini dilakukan secara sepihak. Ia mencoba untuk memberikan bantuan sebanyak-banyaknya yang ditujukan agar statusnya yang lebih tinggi jadi semakin terlihat dan membuat yang lain merasa punya hutang terhadapnya. Ia melakukan hal ini juga semata ingin agar pihak lain tunduk kepadanya dan jika pihak lain hanya bisa memberikan rasa hormat serta rasa terimakasih dipastikan akan sangat tunduk terhadapnya. Misalnya pada fenomena politik, pihak yang selalu memberi secara sepihak maka secara tidak langsung menuntut pihak yang lain melakukan penghormatan lebih dan mendukung ambisi politiknya. Tindakan yang dilakukan tersebut memicu penghargaan dari lain pihak dan status sosialnya semakin terangkat, hal ini bisa juga dikatakan sebagai ajang kompetisi untuk memperoleh penghargaan atau pujian sosial. Juga menjadikan pihak lain menjadi ketergantungan terhadapnya, pihak yang lain ini dapat dikategorikan sebagai subordinasi.

Sementara itu, warga Pare Lor secara tidak langsung disebut sebagai subordinasi sebab mereka hanya dapat memberikan berupa dukungan suara dan dengan patuh mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pihak Haryanti. Lalu di sini yang menjadi pertanyaan adalah akankah selamanya warga Pare Lor mendukung kelanggengan politik dinasti yang bercokol di Kabupaten Kediri. Pernyataan salah seorang informan dari hasil wawancara menyatakan bahwa untuk ke depannya tidak ingin ada hubungan barter terhadap petahana ataupun kerabatnya. Periode kali ini memang jatah terakhir masa jabatan Haryanti, akan tetapi sosok yang dimunculkan akhir-akhir ini diindikasikan akan dimajukan ke pertarungan politik kelak menurut beberapa subjek. Salah seorang subjek mengatakan bahwa ia telah kecewa dengan kepemimpinan Bupati Haryanti sebab dalam membuat kebijakan cukup memberatkan bagi calon pengusaha yang akan mendirikan usaha di wilayah Kabupaten Kediri. Sudah beberapa kali orang yang akan mendirikan usaha seperti pabrik dan SPBU di sekitar Kecamatan Kunjang gagal karena kendala harus mau menanam saham pada perusahaan milik Sutrisno sebesar 10%-20%. Subjek lain menyatakan memang tidak dipungkiri kinerja dari Haryanti ataupun Sutrisno pada masanya cukup memberikan perubahan yang lebih pada progress ketimbang regress, salah satunya dengan adanya usaha pembangunan bandar udara yang saat ini sudah dilakukan pembebasan sekitar 90% di wilayah Kabupaten Kediri bagian barat.

Pemikiran Blau mengenai pertukaran sosial pada proposisi ini tidak relevan jika dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan, sebab warga Desa Pare Lor tidak melakukan sebuah penolakan terhadap pemberian yang diberikan oleh Haryanti-Masykuri. Terbukti jika Haryanti-Masykuri hingga dua periode menjabat sebagai bupati dan Desa Pare Lor masih menjadi desa dengan sumbangan suara tertinggi pada tahun 2015. Sebelumnya di tahun 2010 Desa Pare Lor menyumbangkan suaranya sebesar 81,57% kemudian pada pemilukada tahun 2015 bahkan suara yang diberikan meningkat hingga ke angka 85,11%. Maka, sampai di sini warga Desa Pare Lor dikatakan mendukung langgengnya politik dinasti di Kabupaten Kediri dengan alasan karena kinerja dan program yang diberikan Bupati Haryanti-Masykuri sangat bagus dan mendapat apresiasi dari seluruh warga.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini membuahkan hasil sebuah kesimpulan yang menarik, benar adanya terdapat transaksi barter atau pertukaran sosial antara warga dengan tim pemenangan bupati, selama dua periode masa jabat Bupati Haryanti-Masykuri warga Desa Pare selalu memberi dukungan dalam bentuk suara. Para warga puas akan kinerja bupati, selain itu reward yang sudah dijanjikan juga. Hal inilah yang dapat membuktikan bahwa dinasti dapat dilihat dari sisi positifnya, serta dapat menguatkan putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa petahana atau seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan petahana boleh mengajukan diri sebagai calon pemimpin. Di sisi lain, perlu digaris bawahi bahwa ternyata sebenarnya di balik transaksi barter yang dilakukan warga dengan tim pemenangan ada sosok yang tidak terlihat, justru ia yang menjembatani di balik pertukaran sosial yang terjadi. Dia adalah kepala Desa Pare Lor, yang dengan sukarela mengeluarkan dana secara pribadi demi untuk kelancaran pembangunan infrastruktur di desanya. Akan tetapi, gerakan tersebut memang dilakukan secara *underground* oleh kepala desa Pare Lor sehingga memang banyak warga yang tidak tahu akan hal ini. Meskipun begitu, kepala desa Pare Lor tetap mengapresiasi atas kinerja Haryanti dan suaminya selama memimpin Kabupaten Kediri.

Saran

Penelitian politik dinasti yang ada di Kabupaten Kediri ini perlu adanya tindak lanjut mengingat belum semua proposisi dari teori Peter M. Blau dapat menjadi tolok ukur analisa atas fenomena ini. Hal ini bukan karena suatu hal yang secara sengaja mandek, akan tetapi kepemimpinan yang dipegang oleh petahana belum usai. Oleh sebab itu, perlu adanya lanjutan penelitian yang

seharusnya bisa sampai akhir dari kepemimpinan Haryanti-Masykuri dan bagaimana reaksi warga Desa Pare Lor dengan berakhirnya periode Haryanti sebagai bupati. Apakah akan ada gerakan oposisi atau malah sebaliknya, menyayangkan jika tidak ada sosok penerus dari Sutrisno dan Haryanti.

DAFTAR PUSTAKA

Bpn.go. 2016. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, (online),(www.bpn.go.id/.../Undang-Undang/undang-undang-nomor-23-tahun-2014-4893), diakses pada 27 Februari 2017).

Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

News, Adakita. 2015. *Ketua Tanfidziyah NU Kabupaten Kediri KH Sulaiman Lubis Wafat*, (online), (<http://www.adakitanews.com/ketua-tanfidziyah-nu-kabupaten-kediri-kh-sulaiman-lubis-wafat->), diakses pada 08 Maret 2017).

Paul Johnson, Doyle. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta : PT Gramedia

Poskediri. 2017. *Mengapa Dinasti Politik Tidak Dilarang Secara Hukum?*, (online). (<http://poskediri.com/2017/01/03/47655/mengapa-dinasti-politik-tidak-dilarang-secara-hukum/>), diakses pada 02 Februari 2017).

Sobari, Wawan. 2017. *Patronage Driven Democracy : Emerging Local Politics in the post-Soeharto Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasinda

Tashandra, Nabila. 2017. *Tiga Jenis Dinasti Politik, Mana yang Terkuat?*, (online), (<http://nasional.kompas.com/read/201711274501/tiga-jenis-dinasti-politik.mana.yang.terkuat>), diakses pada 09 Februari 2017).

